

PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PESANTREN MELALUI PELATIHAN AKUNTANSI PESANTREN DI KOTA PADANG SUMATERA BARAT

VanicaSerly¹⁾, Fefri Indra Arza²⁾, Ade Elsa Betavia³⁾, YolandaFitri Zulvia⁴⁾
^{1,2,3,4)}Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang, Padang

ABSTRACT

Financial reporting for Islamic Boarding School (IBS) is expected to increase the credibility and existence of IBS in Padang as a credible and recognized organization. In fact, IBS has lack of knowledge about the latest developments in accounting standards. Training for IBS accounting standards aims to assist accountants in recording and compiling financial reports. This training is needed to update accountant information at IBS in responding to the challenges of preparing financial statements. Furthermore, this training is expected to help IBS's accountant in relation to recording, compiling and reporting financial based on the standards accepted. The results of the pre-test and post-test conducted showed that the participants experienced an increase in their abilities before and after the training. A survey was also conducted to evaluate the implementation of this training. From the survey results it was found that participants felt the benefits of this activity. Based on the above activities, it was concluded that the objectives of the training activities had been achieved.

Keywords: *Financial Reporting, Islamic Boarding School, Training*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Sumatera Barat tidak lepas dari perkembangan Pondok Pesantren. Filosofi adat Minangkabau yaitu *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* menjadi landasan perkembangan Pesantren di Sumatera Barat. "Surau" dalam istilah Minang atau Mesjid atau Mushalla menjadi pola pendidikan masyarakat Minang dari dahulu. Pendidikan modern yang dibalut dengan kultur Islam menjadi corak pendidikan yang telah lama berada di Sumatera Barat. Oleh karena itu, keberadaan pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan di Sumatera Barat mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat Minang.

Pesantren berperan strategis dalam perkembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat dan Kota Padang khususnya. Dengan didukung faktor sumber daya yang dimiliki, pesantren menjadi pencetus pertumbuhan ekonomi syariah dalam bentuk penyediaan barang dan jasa serta menciptakan generasi yang Islami. Untuk mewujudkan hal ini, pesantren tentunya membutuhkan pengelolaan untuk mewujudkan tata kelola pesantren yang baik. Pesantren hendaknya memiliki kemampuan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam tata kelola organisasi. Pertanggungjawaban ini diberikan kepada para *stakeholder* pesantren, yaitu kementerian dan otoritas terkait, lembaga donor dan mitra lainnya. Diharapkan dengan pelaporan keuangan dan tata kelola yang baik dapat meningkatkan kualitas pesantren di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

Peraturan perundang-undangan yang berdampak pada pesantren merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap sistem Akuntabilitas Pondok Pesantren. Kementerian Agama, Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia bekerjasama dan menghasilkan pedoman akuntansi pesantren dan beberapa standar akuntansi yang relevan. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi pionir peningkatan akuntabilitas pesantren terhadap publik [1]. Lebih lanjut, pesantren yang berbadan hukum yayasan mengharuskan mereka untuk patuh pada Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) [2],[3]. Kemudian, terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 revisi 2010 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba membantu pesantren untuk memahami dan meningkatkan akuntabilitas publik. Bank Indonesia tidak kalah dalam membantu akuntabilitas pesantren dan menerbitkan buku pedoman akuntansi pesantren tahun 2018 [4].

Karakteristik pondok pesantren yang merupakan entitas nirlaba memiliki pelaporan keuangan yang berbeda dari entitas bisnis. Perbedaan mendasar antara entitas ini terletak pada cara entitas memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dalam operasinya. Sumbangan para anggota dan penyumbang lain merupakan sumber daya utama yang diperoleh entitas nirlaba. Di beberapa entitas nirlaba, tidak ada kepemilikan, sehingga entitas mendanai dirinya dari sumbangan, utang atau pendapatan atas jasa yang diberikan. Lebih lanjut, beberapa transaksi di entitas nirlaba hampir mirip dengan entitas bisnis, seperti pendapatan atau pengeluaran

¹Korespondensipenulis: Vanica Serly, vanica.serly@gmail.com

operasional. Dengan ciri ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyarankan pesantren untuk mengacu pada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan entitas Nirlaba dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu, pesantren juga mengacu pada PSAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini didasarkan karena beberapa pesantren dikelola dengan jumlah aset yang cukup besar[5].

Bank Indonesia menunjukkan perhatiannya pada pengembangan pesantren dengan menerbitkan pedoman akuntansi pesantren tahun 2018[4]. Pedoman akuntansi pesantren ditujukan pada podok pesantren yang sudah berbadan hukum yayasan. Pada bentuk ini, pesantren telah memisahkan kekayaan antara pesantren dengan pemilik yayasan. Namun, pedoman ini tidak bisa digunakan pada pesantren yang memiliki bentuk hukum perseroan terbatas. Bank Indonesia menerbitkan buku pedoman akuntansi pesantren untuk membantu pesantren dalam mencatat dan menyusun laporan keuangan. Untuk itu, pedoman akuntansi pesantren akan disesuaikan dengan terbitnya PSAK atau ISAK baru yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan.

Berbagai kendala dihadapi pondok pesantren di Kota Padang dalam penyusunan laporan keuangan pesantren. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman terhadap standar, menyebabkan pesantren menyusun laporan keuangan yang kurang atau tidak kredibel. Umumnya, pesantren besar telah mencatat dan menyusun laporan keuangan dengan teknologi berupa aplikasi laporan keuangan. Beberapa di antara menyusun laporan keuangan dengan bantuan program excel sederhana. Selebihnya masih mencatat secara manual di buku catatan keuangan. Walaupun beberapa pesantren besar telah menggunakan aplikasi, akuntan di pesantren masih membutuhkan beberapa *judgment* atau pertimbangan dan penyesuaian terhadap beberapa transaksi sesuai dengan standar akuntansi pesantren. Kurangnya sosialisasi terhadap standar akuntansi ini menyebabkan pesantren terlambat atau tidak mengetahui perkembangan standar yang berlaku [6].

Standar pelaporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan eksistensi pesantren di Kota Padang sebagai organisasi yang kredibel dan diakui. Diharapkan juga, dengan pelaporan keuangan yang berkualitas dapat meningkatkan kemandirian pesantren dalam memperoleh dana besar dan mempertanggungjawabkannya kepada para *stakeholder*. Kurangnya sosialisasi mengenai standar akuntansi pesantren, menyebabkan pesantren kurang atau tidak mengetahui perkembangan standar akuntansi terkini. Untuk itu, diperlukan pelatihan akuntansi pesantren bagi pondok pesantren di Kota Padang untuk membantu akuntan dalam mencatat dan menyusun laporan keuangan. Pelatihan ini diperlukan untuk meng-*update* informasi akuntan di pesantren dalam menjawab tantangan penyusunan laporan keuangan. Lebih lanjut, pelatihan ini dapat membantu kendala yang dihadapi akuntan maupun pemilik pesantren terkait dengan pencatatan, penyusunan dan pelaporan keuangan yang terstandar.

Tulisan ini merupakan hasil Program Kemitraan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim pelaksana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang tahun 2019. Dalam kegiatan ini dilihat apakah terdapat peningkatan pemahaman peserta pelatihan sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan. Lebih lanjut, tim juga melihat persepsi peserta terhadap kualitas pelaporan keuangan di instansi pondok pesantren masing-masing. Tim pelaksana pengabdian juga melakukan survey untuk mengevaluasi kegiatan dengan melihat respon peserta terhadap kegiatan pelatihan.

2. PELAKSANAANPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini berupa pelatihan dan bimbingan terpadu kepada peserta yang merupakan kepala sekolah/ketua yayasan dan bendahara/pengelola keuangan pondok pesantren. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Metode ceramah

Pada metode ini, narasumber menyampaikan materi terkait akuntansi pesantren. Peserta dapat bertanya mengenai ketidakpahaman materi terkait akuntansi pesantren.

2. Metode Diskusi

Metode ini bertujuan untuk menemukan kendala dan permasalahan yang dihadapi pesantren terkait dengan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Dengan kegiatan diskusi, pelatihan menjadi lebih interaktif karena peserta dapat memperoleh jawaban atas kendala yang dihadapinya. Metode diskusi juga membantu narasumber untuk memeriksa pemahaman peserta terkait materi yang diberikan.

3. Demonstrasi

Pada tahap demonstrasi, peserta diberikan pengalaman langsung untuk mempraktikkan mencatat dan menyusun laporan keuangan pondok pesantren melalui kasus.

Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- (a) Persiapan: menghubungi Kepala Sekolah Pondok Pesantren di Kota Padang

- (b) Survey/diskusi: tim mendatangi pondok pesantren dan berdiskusi mengenai penerapan dan kendala akuntansi pesantren
- (c) Kegiatan inti: Pada pertemuan yang telah disepakati diberikan pelatihan selama 2 (dua) hari
- (d) Monitoring: dimaksudkan untuk melihat sejauhmana kemampuan peserta dalam memahami materi yang telah disampaikan.

Pada kegiatan ini, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan pembinaan yang telah dilakukan. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan, maka evaluasi dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu awal, proses, dan akhir. Lembar evaluasi awal (*pre-test*) dilakukan untuk melihat pemahaman materi akuntansi pesantren. *Pre-test* berupa soal-soal *essay* atau pilihan ganda yang disiapkan sebelumnya. Lembar evaluasi proses bertujuan untuk melihat keaktifan dan rasa ingin tahu peserta terhadap materi pelatihan yang diberikan. Evaluasi proses dilakukan dengan mengisi *ceklist* yang dilakukan oleh anggota tim kegiatan kemitraan masyarakat. Evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta setelah pelatihan dilaksanakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan peningkatan kualitas pelaporan keuangan melalui penerapan akuntansi pesantren di Kota Padang telah dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Peserta pelatihan merupakan ketua yayasan/kepala sekolah dan bendahara/pengelola pondok pesantren. Terdapat 14 pondok pesantren di Kota Padang, namun yang memenuhi undangan adalah 12 pesantren dengan jumlah peserta 22 orang.

Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan ini meliputi SAK ETAP dan PSAK 45 mengenai entitas nirlaba. Panduan materi mengikuti pedoman akuntansi pesantren yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu:

1. Pentingnya pencatatan keuangan di pondok pesantren
2. Pengenalan item-item laporan keuangan pesantren (konsep aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban) dalam lingkup pondok pesantren
3. Siklus Akuntansi pesantren
4. Praktik pencatatan jurnal akuntansi pesantren
5. Praktik penyusunan laporan keuangan pondok pesantren



Foto 1: Kegiatan PKM

Untuk mengetahui keberhasilan program ini, maka tim pengusul program kemitraan masyarakat melaksanakan *pre-test* dan *post-test*. Test ini dilaksanakan untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan dilaksanakan. Hasil kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

No. Responden	Nilai Pre-test	Nilai Post-test
1	53	67

2	60	80
3	40	40
4	47	47
5	33	53
6	47	53
7	47	67
8	47	53
9	53	47
10	53	80
11	73	80
12	40	93
13	60	73
14	53	87
15	53	73
16	93	100
17	67	47
18	87	100
19	53	60
20	33	40
21	33	60
Minimum	33	53
Maximum	93	100
Mean	54	67

Sumber: data diolah (2019)

Dari 22 peserta yang hadir, hanya 21 peserta yang mengisi *pre-test* dan *post-test* secara lengkap. Sehingga hanya 21 lembar jawaban yang dapat diolah. Dari hasil *pre-test*, nilai minimum yang didapat peserta adalah 33 dan nilai maximum yaitu 93 dengan rata-rata nilai yaitu 54. Sedangkan hasil *post-test* menunjukkan nilai minimum yaitu 53 dan nilai maximum 100. Rata-rata nilai *post-test* menunjukkan nilai 67. Dari hasil olahan diatas, menunjukkan terjadinya peningkatan kemampuan peserta sebelum dan sesudah dilaksanakannya pelatihan.

Tabel 2: Persentase Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

Nilai	Nilai Pre-test	Nilai Post-test
<50%	33, 33%	19,04%
>50%	66, 67%	80,96%

Sumber: data diolah (2019)

Dari hasil tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *pretest* dibawah 50 adalah 33,33% peserta dan diatas 50 adalah 66,67%. Pada nilai *posttest*, nilai dibawah 50 adalah 19,04% dan nilai diatas 50 adalah 80,96%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan peserta sebelum dan sesudah dilaksanakan pelatihan akuntansi pesantren yaitu sebesar 14,29%.

Perbedaan selisih nilai 14,29% menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Hal ini dapat dijelaskan dari kuesioner mengenai kualitas laporan keuangan pesantren. Penilaian terhadap angket ini menggunakan skala likert, yaitu: sangat setuju dengan nilai 5, setuju dengan nilai 4, kurang setuju dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2 dan sangat tidak setuju dengan nilai 1. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil terkait kualitas laporan keuangan pesantren:

Tabel 3: Kualitas Laporan Keuangan Pondok Pesantren

No.	Pernyataan	Rerata
1	Pondok pesantren telah menyusun laporan keuangan untuk pengambilan keputusan	4,58
	Instansi (pondok pesantren) memiliki pengelola laporan keuangan tersendiri / tidak merangkap jabatan	4,31
	Pengelola laporan keuangan di instansi (pondok pesantren) telah memiliki kompetensi akuntansi, yaitu tamat S1/D3/SMK Akuntansi	4,05
	Pondok Pesantren melakukan pencatatan keuangan manual dalam bentuk buku untuk menyusun laporan keuangan	4,63
	Pondok Pesantren melakukan pencatatan keuangan dengan menggunakan teknologi informasi seperti Excel atau program spreadsheet lainnya untuk menyusun laporan keuangan	4,84

Sumber: data diolah (2019)

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa, belum semua pondok pesantren membuat laporan keuangan dalam pengambilan keputusan dengan nilai rata-rata 4,58. Hampir semua pondok pesantren telah memiliki pengelola laporan keuangan tersendiri dengan nilai 4,31. Pertanyaan ke-tiga terlihat bahwa tidak semua pondok pesantren memiliki tenaga laporan keuangan berlatar belakang akuntansi dengan nilai rata-rata 4,05. Pada umumnya, pondok pesantren telah melakukan pencatatan dalam bentuk buku untuk menyusun laporan keuangan dengan nilai 4,63. Lebih lanjut, hampir semua ponpes telah menggunakan teknologi informasi untuk menyusun laporan keuangan dengan nilai rata-rata 4,84. Survey mengenai kualitas laporan keuangan pesantren menunjukkan persepsi peserta terhadap pelaksanaan akuntansi pesantren di instansi masing-masing. Namun, dari hasil *pre-test* menunjukkan peserta baru menguasai materi akuntansi pesantren dengan nilai rata-rata 54.

Untuk mengevaluasi kegiatan, maka dilakukan evaluasi terhadap pelatihan yang diperoleh dengan kuesioner respon dari peserta. Kuesioner terdiri dari 6 pertanyaan dengan penilaian skala *likert*. Penilaian yaitu sangat setuju dengan nilai 5, setuju dengan nilai 4, kurang setuju dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2 dan sangat tidak setuju dengan nilai 1. Tabel berikut merupakan tabulasi dari hasil kuesioner respon:

Tabel 4: Hasil Kuesioner Respon

No Item	Daftar Pertanyaan	Rerata
1	Peserta dapat memahami dengan baik materi yang diberikan	4,65
2	Narasumber menyampaikan materi dengan menarik dan mudah untuk dipahami	4,65
3	Waktu pelaksanaan pelatihan telah cukup memadai	4,4
4	Peserta masih memerlukan pelatihan tambahan untuk topik yang sama	4,2
5	Peserta dapat meng- <i>update</i> pengetahuan tentang materi akuntansi pesantren	4,65
6	Materi pelatihan dapat membantu akuntan dalam menyiapkan laporan keuangan pesantren	4,75
	Rata-rata	4,55

Sumber: data diolah (2019)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa peserta dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan narasumber dengan rata-rata nilai 4,65. Untuk pertanyaan apakah narasumber menyampaikan materi dengan menarik dan mudah dipahami, peserta memberikan respon nilai 4,65 atau sangat baik. Peserta menganggap waktu pelaksanaan pelatihan telah cukup memadai dengan nilai 4,4. Peserta juga masih memerlukan pelatihan tambahan untuk topik yang sama yaitu dengan rata-rata nilai 4,2. Lebih lanjut, peserta menganggap pelatihan dapat meng-update pengetahuan tentang materi yang diberikan dengan nilai rata-rata 4,65. Respon tertinggi diberikan untuk item pertanyaan mengenai apakah materi pelatihan dapat membantu akuntan dalam menyiapkan laporan keuangan pesantren dengan rata-rata nilai 4,75. Respon dari peserta ini menunjukkan bahwa peserta merasakan manfaat dari kegiatan ini untuk membantu akuntan dalam menyiapkan laporan keuangan pesantren.

Dari kritik dan saran yang diberikan peserta, dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta antusias dengan pelatihan ini. Ke depan diharapkan pelatihan ini dapat dilaksanakan kembali terutama untuk praktik penyusunan laporan keuangan pesantren dan *software* akuntansi pesantren.

4. KESIMPULAN

Standar pelaporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan eksistensi pesantren di Kota Padang sebagai organisasi yang kredibel dan diakui. Diharapkan juga, dengan pelaporan keuangan yang berkualitas dapat meningkatkan kemandirian pesantren dalam memperoleh dana besar dan mempertanggungjawabkannya kepada para *stakeholder*. Kurangnya sosialisasi mengenai standar akuntansi pesantren, menyebabkan pesantren kurang atau tidak mengetahui perkembangan standar akuntansi terkini.

Pelatihan akuntansi pesantren bagi pondok pesantren di Kota Padang bertujuan untuk membantu akuntan dalam mencatat dan menyusun laporan keuangan. Pelatihan ini diperlukan untuk meng-update informasi akuntan di pesantren dalam menjawab tantangan penyusunan laporan keuangan. Lebih lanjut, pelatihan ini dapat membantu kendala yang dihadapi akuntan maupun pemilik pesantren terkait dengan pencatatan, penyusunan dan pelaporan keuangan yang terstandar.

Hasil *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan menunjukkan peserta mengalami peningkatan kemampuan sebelum dan sesudah dilaksanakan pelatihan. Survey juga dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan pelatihan ini. Dari hasil survey ditemukan bahwa peserta merasakan manfaat dari kegiatan ini. Berdasarkan kegiatan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa tujuan dari kegiatan pelatihan ini telah tercapai.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [4] Bank Indonesia. 2018. Pedoman Akuntansi Pesantren Efektif per Mei 2018. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- [5] Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. PSAK Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba No.45. IAI.
- [2] Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. Standar Akuntansi Keuangan: Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. IAI
- [3] Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. Standar Akuntansi Keuangan. IAI
- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004. Tentang wakaf
- [6] Kurniawan. Kapita Selekt Akuntansi “Ngabuburit Ala Akuntan”. Universitas Sangga Buana YPKP. Presentasi oleh IAI Jabar

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Karya tulis ini merupakan hasil kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dilakukan tim pelaksana dari Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang. Dana PKM merupakan dana PNBPN Universitas Negeri Padang.